

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi tentang familisme di Indonesia merupakan studi yang menarik dan penting untuk dikaji. Misalnya studi tentang politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era reformasi yang membahas studi tentang rekrutment politik pada partai Golkar, PAN, dan Demokrat Sulawesi Selatan pada 2009, atau revivalisme kekuatan familisme dalam demokrasi dengan mengambil kasus politik dinasti Ratu Atut Gubernur Banten, dan juga “*Survival Against The Odds : the Djunaid Family of Pekalongan, Central Java*” yang membahas pengaruh keluarga pengusaha, Djunaid, di Pekalongan hingga mengantarkan anak-anaknya menjadi Bupati Pekalongan.

Studi-studi tersebut sayangnya lebih banyak fokus kepada praktik politik familisme di kepala daerah. Belum banyak yang mengkaji familisme di partai politik, padahal praktik tersebut sudah sangat umum terjadi. Misalnya familisme yang terjadi di partai PDIP, kuatnya trah Soekarno dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapuk anaknya Puan Maharani sebagai Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi DPR, dan suaminya Alm. Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR. Kemudian di partai Demokrat, kuatnya pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua partai juga membuatnya mengusung anak-anaknya ke panggung politik nasional, seperti Agus Harimurti Yudhono yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, dan anaknya Edhi Baskoro Yudhoyono yang menduduki jabatan di DPR RI (Harjanto, 2011 : 156).

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat praktik di daerah Rembang dengan menggunakan kasus partai PPP sebagai contoh kajian. Alasan yang mendasarinya adalah karena Partai Persatuan Pembangunan menjadi basis pemilihan masyarakat Kabupaten Rembang. Kuatnya politik patronase di dalam partai dan pengaruh Kiai terhadap keberjalanan partai menjadi landasan mengapa peneliti memilih PPP di Kabupaten Rembang sebagai salah satu objek penelitian. Kuatnya pengaruh Kiai dalam tubuh PPP menjadi alat bagi penggerak politik PPP untuk menjalankan kepentingannya (Fahmi, 2014). Hal ini dibuktikan setiap pemilukada, para calon dari PPP atau pengurus partai PPP menemui Kiai Haji Maimoen Zubair untuk memohon doa restu, meminta wejangan atau pendapat mengenai calon yang akan maju atau hanya memohon dukungan. Kiai Haji Maimoen Zubair adalah Kiai pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Kabupaten Rembang. Ia merupakan salah satu orang yang paling di hormati di wilayah Rembang. Titah perkataan Kiai Maimoen akan di ikuti oleh seluruh santri dan masyarakat Rembang, termasuk oleh pengurus dan politisi partai PPP.

Hasil penelitian Wasisto Raharjo Jati (2013:215) dalam ranah lokal, romantisme nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat eksis terus menerus. Familisme sendiri dibentuk dalam tiga level, yakni figure (*personalism*), klientelisme (*clientism*), dan tribalisme (*tribalism*) sebagai ketiga kunci dalam mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan demokrasi lokal di Indonesia. Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang di lakukan dalam dua jenis yakni secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat relasionalnya sehingga kerabat

yang ingin memasuki kancah pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Hal ini terjadi pada Mantan Bupati Kendal, Alm. Hendy Boedoro yang di awal pencalonannya ia sangat disukai oleh masyarakat karena sikap ramah dan programnya yang bagus untuk masyarakat. Hingga pada jabatan periodenya yang ke dua Hendy terjatuh kasus korupsi APBD 2003-2004. Kemudian dengan lengsernya Hendy pemilu dilakukan kembali dan istrinya Widya Kandi terpilih sebagai Bupati Kendal yang diusung oleh partai PDIP. Hal ini dilakukan untuk mendorong terjalannya program Bupati sebelumnya yang sudah bagus maka istrinya akan di dorong maju mejadi Bupati. Kemudian suaminya akan menjadi *godfather* dibalik pemerintahan lainnya. Namun, dalam kepemimpinan Widya Kandi, dirinya menunjukkan etika buruk sebagai seorang pemimpin karena terlibat kasus “perselingkuhan” yang menyebabkan ia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan dikabulkan oleh pengadilan. Dan pada periode selanjutnya (2015-2020) dirinya mencalonkan kembali namun berhasil dikalahkan oleh Mirna Annisa, Bupati Kendal yang sekarang. Adapun *by accident* sendiri terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan “informal” terhadap penggantinya kelak jika dalam pemilukada (Jati, 2010).

Kapitalis kroni merupakan rekanan teman dari salah satu anggota dinasti politik yang juga memiliki keistimewaan yang sama yakni mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur maupun proyek lainnya yang beromzet miliaran rupiah (Jati,2010). Sistem ini terjadi pada keluarga Djunaid di Kabupaten Pekalongan. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Amalinda Savirani (2016:407), keluarga Djunaid merupakan “orang kayanya Pekalongan”. Berawal

dari seorang pengusaha Achmad Djunaid yang berhasil melalui program Benteng di era Orde lama. Kemudian anaknya Zaki mengembangkan perusahaan batik nasional hingga menciptakan kedekatannya dengan pemerintahan Orde baru, membantu anak cucunya Alex menjadi kepala daerah atau walikota di wilayah Pekalongan, melalui keuntungan perusahaan batik yang dikelola menjadi sumber utama pendanaan politik bahkan sampai ke tingkat nasional.

Lemahnya institusionalisasi partai politik (Harjanto, 2011) juga menciptakan politik familisme karena hal tersebut menjadi pilihan yang menarik bagi partai politik untuk memenangkan posisi politik karena adanya keunggulan *electoral* dari para calon seperti popularitas, sumber daya finansial, dan kemampuan mobilisasi massa. Parpol menjadi mementingkan kemenangan calonnya dibandingkan dengan memikirkan efektivitas dari kepemimpinan jangka panjang calon yang diusung. Sehingga abnormali atau absurditas dukungan politik pun sering diambil oleh partai besar karena untuk menjamin kemenangan dalam pilkada (Harjanto, 2011). Tentunya ini akan merusak fungsi dari partai politik itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu PDI Perjuangan, dimana pernah saya temukan dalam waktu menjelang mendekati pemilu, PDI Perjuangan membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan kemudian akan di usung oleh partai tersebut. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kodrat partai yang seharusnya menciptakan kader yang berkompeten untuk maju ke dalam Pilkada. Tetapi justru orang yang memiliki sumber daya finansial yang tinggi yang akan di usung menjadi calon dalam kepala daerah dalam Pilkada.

Tiga hal tersebut menjadi sebab permasalahan politik familisme menjadi menarik untuk di teliti karena praktek politik familisme dialami hampir beberapa

wilayah di Indonesia, bahkan juga oleh beberapa partai besar di Indonesia. Padahal sistem pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi. Dan tentunya fenomena politik dinasti ini dinilai "mengurangi makna demokrasi" serta menjadi kritik masyarakat sekaligus mengusik nilai-nilai demokrasi universal yang mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara untuk menjadi calon kepala daerah melalui pemilihan secara langsung. Pasalnya praktik politik familisme ini tidak dilarang dalam hukum di Indonesia.

Praktik politik familisme ini juga memperkuat politik patronase partai politik dimana kekuatan seorang tokoh figure dan keluarganya menjadi patron bagi kader partai atau pengurus partai lainnya (*client*) (Harjanto,2011). Menurut Kartz dan Crotty (2014), hubungan patron dan klien merupakan hubungan mutualisme dimana patron (elit partai) memberikan atau menyediakan akses, bantuan dana, relasi, kekuatan figur kepada klient (partai) dan klient memberikan imbalan barang dan jasa (dukungan, tenaga kerja, tindakan sosial, loyalitas, dll) dan dalam hal ini patron mampu menggerakkan dan mempengaruhi klient. Jika melihat dari teori tersebut, dengan adanya fenomena familisme di dalam partai politik, tentunya elit familis tersebut telah menjadi patron bagi partai yang mengusungnya, dan kemungkinan besar akan sulit bagi anggota atau kader partai yang lain untuk mampu memperoleh dukungan jika posisi partai digerakkan oleh elit partai. Uniknya adalah fenomena patronase di Indonesia tidak hanya berdasar kemampuan uang saja tetapi juga kemampuan memberikan pengaruh, keturunan “darah biru” dan populism di masyarakat. Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdiri berdasar garis sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dengan kekuatan Kiai sebagai patronnya dan

nahdliyin sebagai klient dalam partai tersebut. Kiai dalam kedua partai tersebut mampu mempengaruhi keputusan yang di ambil dalam partainya (Jati,2013). Sosok Kiai mampu menjadi “*godfather*” dan *wejangannya*¹ mampu merubah keputusan partai yang tidak sejalan dengannya. Posisinya sangat di hormati oleh jama’ah lainnya hingga keturunan-keturunannya pula di anggap sebagai “darah biru” dalam partai tersebut. Sehingga kekuatan trah “Kiai Haji” menjadi kekuatan untuk keturunannya memperoleh akses relasi dan ketenaran. Sedangkan kita tahu bahwa NU memiliki basis massa masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Dan silsilah keluarga “Kiai Haji” dalam politik lokal telah mendominasi di masyarakat lokal Jawa yang kemudian keluarga tersebut menjadi tokoh berpengaruh bagi masyarakat lokal. Karena alasan ini pula politik familisme penting dan menarik untuk di kaji.

Dalam skripsi ini, peneliti melihat budaya politik familisme ini sebagai fenomena sosial yang terjadi di dalam partai politik. Karena politik familisme mampu merambah ke seluruh partai, bukan hanya partai berbasis nasionalis tetapi juga agamis dengan berbagai konsep yang berbeda. Dan fenomena ini telah menjadi hal yang *mainstream* di temui dalam politik lokal yang menciptakan raja-raja kecil di era setelah reformasi. Hal ini tentunya kontradiksi dengan demokrasi yang diciptakan di Indonesia sebagai rahim kekuatan munculnya reformasi untuk melawan pemerintahan orde baru. Munculnya banyak partai sebagai salah satu tanda demokrasi telah tercapai. Namun kemunculan partai tersebut digunakan oleh segelintir orang sebagai batu pijakan untuk memperoleh kekuasaan hingga memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Sehingga yang terjadi adalah

¹ Pidato yang bertujuan untuk menasehati, memberikan petunjuk atau arahan dalam bahasa Jawa

oligarki dalam tubuh partai politik tersebut karena kekuatan elit partai yang merangkul familinya untuk mendominasi partai. Tetapi pada realita yang terjadi di masyarakat, elit politik tersebut tetap mengikuti prosedur secara demokratis sehingga masyarakat sendiri yang memilih mereka sebagai penguasa di wilayahnya.

Kuatnya politik familisme dalam tubuh partai PPP di Kabupaten Rembang menjadi masalah yang menarik untuk diteliti oleh peneliti. Karena PPP merupakan salah satu partai yang mendominasi di Kabupaten Rembang. Bahkan di periode 2014-2019 fraksi PPP mampu menduduki kursi terbanyak di dewan yaitu 10 kursi di DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini juga diperkuat dengan kekuatan kekerabatan tokoh Kiai yaitu K.H Maimoen Zubair kepada anak, santri maupun pengurus pondok pesantrennya. Dalam penelitian Muhammad Aris Fahmi dkk (2014) yang berjudul *“Relasi Partai Politik Berbasis Massa Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan dengan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang”* menjelaskan bagaimana relasi antara PPP dengan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang melalui kuatnya kharisma dan pengaruh yang dimiliki Kiai Mun kepada pesantrennya dan keberjalanan partai politik PPP di Rembang. Sebagian pengurus pondok pesantren tersebut juga merupakan pengurus partai PPP di DPC Rembang, bahkan salah satunya berhasil lolos menjadi anggota dewan di DPRD Rembang, yaitu KH Majid Kamil MZ yang memperoleh suara tertinggi dari dapil 4 Kabupaten Rembang dengan perolehan 6.481 suara (Fahmi, 2014). Hal ini disebabkan salah satunya pondok Pesantren Al-Anwar telah menjadi basis massa bagi partai PPP.

PPP sebagai partai penguasa Kabupaten Rembang ini tentunya tidak lepas dari praktik patron-klien di dalam partai. Kiai Maimoen sebagai salah satu tokoh terkemuka NU dan pemilik Pondok Pesantren Al-Anwar yang menjadi basis suara PPP menjadi salah satu patron bagi PPP. Kekuatan pengaruhnya bukan hanya sebagai *vote-getters*, tetapi juga sampai pada penentuan calon kandidat dalam pemilu. Pada pilkada tahun 2018 ini, anak ke dua Kiai Maimoen yaitu Taj Yasin atau yang biasa dikenal dengan Gus² Yasin akan mendampingi Gubernur Ganjar Pranowo untuk maju pada pilkada tahun 2018 sebagai wakil gubernur yang diusung oleh PPP. Taj Yasin merupakan sosok politisi muda yang saat ini menjadi anggota dewan di DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 di Komisi E. Berdasarkan keterangan dari artikel DPP PPP sendiri, ia maju sebagai wakil gubernur merupakan pembicaraan DPP PPP dan ayahandanya K.H Maimoen Zubair. Tentu saja ini menggambarkan kharisma Kiai Maimoen yang sangat kuat, bukan hanya berhasil membawa pengurus pondoknya tetapi juga anaknya. Bahkan Kiai Maimoen selalu menjadi tempat sowan bagi politisi yang ingin maju ke pikada, contohnya pada pilkada 2018 ini yaitu Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang akan maju kembali ke pilkada tahun 2018 dan Ridwan Kamil Walikota Bandung yang akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat di pilkada 2018.

Kekuatan dari kharisma Kiai Maimoen ini tentu saja juga mengangkat “derajat” keluarga Kiai Maimoen yang berbeda di dalam partai. Pengaruh dari genealogis atau sosiologis seseorang terhadap Kiai Maimoen menjadi kekuatan tersendiri bagi orang tersebut sebagai *bargaining positionnya* di dalam partai. Di

² Panggilan untuk anak para kiai

Rembang sendiri selain Kiai Maimoen juga ada kiai yang memiliki pengaruh, yaitu Alm. Kiai Ahmad Thoyfoer. Kedua kiai tersebut juga merupakan tokoh yang berpengaruh dalam partai PPP. Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisa bagaimana praktik familisme dalam partai melalui pengaruh dari kiai tersebut atau pun tokoh lainnya yang memiliki kekuatan familis di dalam partai PPP. Bukan hanya menganalisis dari familisnya saja, tetapi peneliti juga ingin menganalisis ke efektifan dari kepemimpinan yang berasal dari familis tersebut. Apakah dengan adanya kekuatan dari familis tersebut membuat bentuk kepemimpinan partai menjadi lebih baik atau buruk. Apakah dengan kekuatan familis tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.

Kita ketahui bahwa praktik politik familisme ini mempengaruhi kedalam partai politik. Bagaimana perekrutan calon sebagai pintu awal masuk dalam panggung politik? Hingga bagaimana caranya partai mampu memenangkan namun juga beberapa kali di berbagai daerah? Mengapa dengan adanya politik familisme yang terjadi, masyarakat tetap menyerahkan kepemimpinan terhadap segelintir elit politik tersebut? Seberapa kuatkah pengaruh elit politik partai di dalam partai pengusungnya? Karena itu, penelitian ini layak dikaji karena praktik politik familisme sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan di berbagai negara di dunia seperti Amerika dan Filipina, namun kajian yang membahasnya masih sangat terbatas. Terlebih lagi kajian familisme didalam partai itu sendiri. Karena konsep familisme biasanya menjadi role model untuk mengkaji politik familisme yang dilakukan kepala daerah atau anggota dewan. Sedangkan realitanya politik familisme ini juga terjadi didalam tubuh partai yang

akhirnya membatasi anggota partai lainnya untuk maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau elit partai dan mengkerdilkan demokrasi bagi kader partai yang lainnya. Sehingga dengan adanya penelitian ini mampu menambah sumber kajian yang dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya sebagai bahan studi. Dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan maka akan membuka mata dan wawasan bagi setiap pembaca, pembelajar atau praktisi politik untuk mempengaruhi dan merubah kebijakan kepemimpinan di Indonesia kepada jalur demokrasi yang sebenarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik familisme di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan kondisi yang terjadi sejak jaman partai itu di dirikan. Pengaruh kiai yang mampu menjadi penentu geraknya partai atau *godfather* pada PPP menjadi penjelaras sentral penelitian ini. Hal yang sama terjadi di Rembang sebagaimana praktik dalam kasus tersebut. Berdasarkan kondisi di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:

- Bagaimana praktik politik familisme di dalam Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana terjadinya praktik politik familisme yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia di era setelah reformasi sekarang. Pergerakan politik familisme yang tidak bisa di bendung, karena setiap orang juga memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih sesuai asas demokrasi. Bukan hanya itu saja, beberapa dari masyarakat

juga mempercayai bahwa kerabat dari pemimpin yang berhasil sebelumnya pasti juga akan mampu memimpin daerahnya di masa datang. Pengaruh-pengaruh positif dari pemimpin tersebut juga dapat mengalir kepada kerabatnya yang memimpin setelahnya. Sehingga model seperti ini bukan hanya sebagai role model dalam pemilihan kepala daerah namun juga pemimpin partai seperti PPP itu sendiri.

Penelitian ini juga ingin mengkaji fenomena sosial dalam partai politik di aras lokal yang sangat kuat dengan politik familismenya. Dimana ketika daerah diberikan otonomi daerah cenderung menciptakan raja-raja kecil dari klan-klan lokal yang dipengaruhi pula oleh unsur-unsur sejarah sebelumnya. Sehingga ada rasa dari elit politik lokal untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah yang dipimpinnya. Hal ini juga memicu para peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Pada dasarnya, kebanyakan peneliti sebelumnya fokus pada permasalahan politik familisme yang dilakukan kepala daerah seperti penelitian Savirani (2016), atau mengenai kelemahan partai politik dalam proses rekrutmen anggota dan institusionalisasi politik yang telah dilakukan oleh tiga peneliti yaitu, Harjanto (2011), Purwaningsih (2013) dan Jati (2010). Padahal politik familisme ini terjadi bukan hanya faktor kepala daerah atau lemahnya rekrutmen dan institusionalisasi, tetapi juga karna faktor politik patronase dan sistem oligarki yang kuat didalam tubuh partai. Sehingga sejatinya partai sebagai simbol demokrasi, namun didalamnya terdapat kekuatan oligarki yang mampu mengkerdikan demokrasi tersebut. Dan ada kecenderungan prosedur pemilukada hanya sebagai kamufase bagi elit politik untuk tetap menjunjung asas demokrasi namun dibalik itu berupaya untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Sehingga

penelitian ini berkontribusi untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan teori patron-client dan oligarki politik sebagai bahan kajian.

Peneliti ingin mengkaji budaya familisme sebagai fenomena sosial yang memang terjadi di masyarakat, bukan sebagai bentuk keberpihakan pro dan kontra mengenai politik familisme itu sendiri. Dengan kasus yang di ambil yaitu politik familisme yang terjadi dalam tubuh partai PPP Kabupaten Rembang, dengan melihat Kiai dan petinggi PPP sebagai patronnya. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu untuk menjawab bagaimana posisi Kiai sebagai orang yang berpengaruh didalam perpolitikan di Indonesia khususnya Rembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian diatas yang hendak dicapai tentunya akan membawa manfaat di dunia perkuliahan Ilmu Pemerintahan, penelitian sosial, dan kajian-kajian antropologi politik masyarakat di Indonesia. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada perkuliahan Ilmu Pemerintahan mengenai dinamika politik di Indonesia yang bergerak karena kekerabatan, jaringan dan ketokohan seseorang di dalam struktur politik Indonesia. Bahwasannya panggung politik di Indonesia hampir di dominasi oleh beberapa orang hingga mengakar sampai keketurunannya merupakan fakta yang tidak bisa di hindari. Pemilik kekuasaan biasanya ingin menurunkan kekuasaannya kepada keturunannya untuk melanjutkan estafet kekuasaan yang berhasil di raih. Tentunya ini menjadi sumbangan kajian yang terus berkembang karena Indonesia merupakan demokrasi dan bertolak belakang dengan realita yang ada. Secara teori, jika Negara menganut demokrasi maka rakyat bebas menentukan siapa penguasanya dan bebas untuk hidup bernegara. Tetapi realita

yang ada justru Indonesia terlihat seperti Negara dengan sistem dinasti, kerajaan, atau kekuasaan elit politik semata. Meskipun demikian, perolehan kekuasaan atau pengaruh yang terjadi tidak seperti pada negara monarki atau sosialis dengan kudeta, tapi bisa diperoleh melalui cara-cara demokratis sehingga masyarakat sendiri ternyata yang memilih orang-orang tersebut. Hal ini memang menjadi banyak pertanyaan bagi peneliti, apakah dasar yang melatarbelakangi akhirnya orang-orang tetap memilih golongan elit tersebut, pengaruh apa yang dibawa oleh mereka sehingga mampu membuat pandangan masyarakat bahwa mereka golongan elitlah yang bisa membawa perubahan.

Penelitian ini juga menjadi sebuah referensi baru bagi penelitian tentang familisme dalam partai politik di Indonesia selanjutnya. Mengangkat studi kasus yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang familism, politik dinasti dan *patron-client* yang terjadi di Indonesia. Dengan mengambil salah satu contoh partai politik islam, penelitian ini akan memberikan fakta yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya mayoritas membahas kekerabatan yang dilakukan oleh penguasa daerah, penelitian ini membahas bagaimana besarnya kekuasaan seorang kiai yang tinggal di desa namun pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan politik negara bagi beberapa orang. Sehingga pola kekerabatan dari kelompok ini memiliki cara dan corak yang berbeda, bukan hanya sekedar kekuasaan semata tetapi ada pengaruh dan dorongan dari golongan masyarakat santri yang kuat.

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, peneliti dan universitas dalam menunjang kemajuan ilmiah di bidang politik dan

sosial masyarakat. Bagi penulis penelitian ini bisa menjadi pengalaman untuk meneliti sebuah kasus yang kemudian dikaji hingga menjadi tulisan ilmiah dan menemukan fakta-fakta baru di lapangan. Penelitian ini secara praktis juga sangat bermanfaat untuk kajian sosiologi dan antropologi politik. Secara sosiologis, seorang santri dan kiai memiliki sifat dan perilaku politik yang khas dan cenderung berbeda dengan masyarakat awam pada umumnya. Mereka juga berkembang dengan pola-pola yang berbeda dengan masyarakat umum. Sehingga secara antropologi pula, politik kiai dan kaum santri menciptakan budaya masyarakat yang khas di kalangan kaum santri (nahdliyin). Tentunya penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk menambah referensi bagi para peneliti selanjutnya yang membahas tentang politik kekerabatan, politik kaum santri dan kiai, atau tentang partai politik islam, dan lain sebagainya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Politik Familisme sebagai Relasi *Patron-Client*

Suad Joseph berpendapat bahwa politik familisme mengacu penyebaran institusi keluarga, ideologi, idiom (kekerabatan idiomatik), praktik, dan hubungan oleh warganegara mengaktifkan kebutuhan dan tuntutan mereka sehubungan dengan negara atau pemerintahan dan negara atau aktor negara untuk memobilisasi dasar praktis dan moral untuk pemerintahan berdasarkan mitos kekerabatan sipil dan wacana publik yang memberi hak istimewa kepada keluarga (Joseph, 2011). Kekayaan politik mengharuskan negara dan warganya mengenali sentralitasnya dari "keluarga" ke kehidupan sosial dan proses politik. Kekuasaan politik, sebagai seperangkat konsep, tidak menganggap hubungan keluarga atau praktik keluarga yang tidak berubah. "Family" sebagai sebuah gagasan dan sebuah

institusi dan "Familisme" sebagai ideologi, hubungan, dan praktik adalah hasil dari proses berlapis-lapis yang sangat politis (Donzelot 1997; Elshtain 1982; Joseph 2011).

Pembahasan dalam kajian ilmu sosial politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya (Jati, 2013). Pengertian lainnya menjelaskan, bahwa familisme juga dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk berkarir di dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon;2002 dalam Jati;2013). Sebenarnya secara konseptual, preferensi politik *family* lebih mengarah pada penjaga moral dari pada mengejar kekuasaan. Sedangkan melanggengkan kekuasaan yang dilakukannya itu hanya untuk menjaga zona nyaman dan keamanan yang telah diperoleh atas dasar naluri alamiah manusia.

Konsep familisme di Eropa atau di Amerika Utara berbeda dengan yang terjadi di negara dunia ketiga. Familisme dimaknai sebagai usaha untuk menuburkan favoritisme, nepotisme dan seksionalisme, maupun regionalism, karena didorong oleh semangat untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan secara kolektif. Namun demikian, derajat ketergantungan dengan keluarga juga berdiferensiasi bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Artinya hubungan genealogis atau hubungan darah (*consanguinity*) tidaklah menjadi patokan bagi seseorang untuk mendorong sanak *family*nya kedalam ranah politik. Hal ini dikarenakan ada faktor lain yaitu lingkungan, masyarakat, rekan bisnis, atau

orang yang memiliki visi yang sama maupun kondisi tertentu yang akhirnya mendorong munculnya politik dinasti. Inilah yang kemudian memperjelas pengertian mengenai politik familisme dan politik dinasti, yang mana kita ketahui bahwa politik familisme merupakan bagian dari politik dinasti. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, politik dinasti dapat terjadi karena faktor eksternal genealogis yang mempengaruhi dan cenderung bertumpu pada kekuasaan.

Politik familisme dalam konsep ini merupakan nama lain dari praktik politik dinasti. Sebab keduanya sama-sama membangun relasi politik untuk koloni keluarganya. Tetapi yang mendasari mengapa penulis lebih menggunakan nomenklatur politik familisme daripada politik dinasti adalah mengacu pada konsep politik dinasti di wilayah Eropa dan Amerika yang menonjol pada hubungan keluarga dari generasi ke generasi disertai penguatan kepentingan kekuasaan, bisnis dan kekayaan pribadi, sedangkan politik familisme dalam konsep ini lebih menonjolkan bagaimana hubungan relasi yang sangat erat bukan hanya berdasarkan geneologis keluarga dari generasi ke generasi tetapi juga relasi dengan orang lain yang hubungannya sudah seperti keluarga didalam praktik politik. Oleh karena itu, penggunaan kata familisme akan lebih tepat di gunakan untuk menggambarkan bagaimana praktik dari membangun relasi dengan berbagai bentuk jaringan yang ada di masyarakat yang sudah sangat erat hubungannya dengan para elit politik. Sasaran yang dituju adalah relasi yang dibangun melalui kultur sosial budaya yang di hidup dalam masyarakat dan sedikit banyak tidak memandang kepentingan yang bersifat material. Meskipun pada akhirnya hal ini juga akan mempengaruhi kekuatan politik kekuasaan.

Politik familisme di Indonesia muncul karena faktor pemerintahan Indonesia yang sentrasisasi di masa Orde Lama dan Orde Baru yang tidak mampu merepresentasikan pikirannya di masa itu (Chalik, 2017). Kuatnya peran elite politik pada saat itu menjadi faktor utama bagaimana Indonesia dipimpin oleh segelintir atau sekelompok orang selama lebih dari 50 tahun. Dan kejayaan elite politik terjadi ketika masa Orde Baru, dimana negara seluruhnya di kuasai oleh Soeharto dan klan politiknya. Di masa inilah politik familisme marak terjadi di Indonesia. Bukan hanya melalui hubungan darah vertical (bapak dan anak) tetapi juga horizontal (saudara terdekat). Bahkan politik familisme ini juga terjadi karena hubungan kekerabatan yang tidak ada hubungan darah. Namun, kekuasaan *family* Soeharto mulai runtuh ketika masa reformasi dengan perubahan sistem menjadi desentralisasi.

Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan daerah secara mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan elite politik maupun elite birokrasi. Monopoli kekuasaan di daerah lokal tertentu, tentunya menjadi catatan hitam bagi desentralisasi di Indonesia. Akibatnya desentralisasi justru menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal. Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elite politik menjadi persoalan baru. Hak otonom yang dimiliki daerah menciptakan beragam partisipasi bahkan kontestasi oleh elite politik lokal dalam memperoleh, menjalankan serta mempertahankan legitimasi mereka dalam masyarakat (Siti Zuhro dalam Chalik ; 2017). Desentralisasi pula menciptakan bertaKiainya aktor politik di tingkat pusat maupun lokal. Hal ini tentunya berdampak pada munculnya politik oligarki dan otoritarianisme baru. Kondisi tersebut tercipta

akibat munculnya *local strongmen* (elit lokal) yang kemudian menciptakan dinasti politik, pola korupsi baru dan penyalahgunaan wewenang. Karenanya jika kita berbicara politik familisme tidak lepas dari peKiaiasan mengenai elit politik yang menjadi aktor utama dalam permainan politik familisme.

Elit politik merupakan individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibanding dengan yang lain. Hal yang dimaksud dari kekuasaan adalah kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai perbuatan untuk mempengaruhi perbuatan kolektif. Menurut Pareto dalam Chalik (2017:40) ada empat tipe elit politik. Pertama, elit politik yang memerintah dengan kelicikan. Cara memerintah dengan kelicikan tidak hanya terjadi di negara yang menganut paham otoriter, tetapi juga negara yang menganut paham demokratis. Kedua, elit politik yang memerintah dengan cara paksa. Model elit seperti ini banyak terjadi di negara yang menganut paham komunis dan otoriter. Para elit politik menggunakan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Ketiga, elit politik konservatif, yakni elit yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Segara aturan dibuat agar dapat mempermudah dirinya dan kelompoknya dalam memperoleh akses terhadap kekuasaan. Elit tipe inilah yang menurut penulis merupakan tipe yang dimiliki aktor politik familisme. Aktor berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan melibatkan *klan*, golongan atau keluarganya masuk ke dalam panggung politik dan memperoleh kekuasaan guna mempertahankan kekuasaannya. Keempat, elit politik liberal, yakni elit yang berkerja untuk kepentingan umum dan membuka seluas-luasnya

bagi setiap anggota masyarakat untuk menyatakan pendapat, memberikan masukan dan kritik.

Penjelasan dari elit politik tersebut, sejalan pula dengan politik familisme sebagai relasi dari teori patron-klien. Dalam teori patron-klien tersebut seseorang menjadi tokoh penggerak bagi orang-orang di sekelilingnya untuk mengikuti jejak langkah yang di inginkan oleh tokoh tersebut. Elit (patron) tersebut menjadi “panutan”, setiap kata atau perintahnya dapat saja di “turuti” oleh orang-orang (klien) di sekelilingnya. Konsep ini muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam kepemilikan sumber daya masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang (Agustino, 2014). Seperti pendapat Scott (1972) dalam tulisan Leo Agustino (2014) :

The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.

Pendapat Lande (1977:xx) dalam tulisan Leo Agustino (1972) pula mendefinisikan relasi patron-klien ini sebagai berikut:

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.

Merujuk penjelasan tersebut hubungan keduanya terwujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan “pertukaran kepentingan”. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron (Agustino, 2014).

Keterkaitan antara teori patron-klien dengan konsep politik familisme ini telah digambarkan dengan sangat baik oleh Saya Sasaki Shiraishi dalam penelitiannya yang dibukukan dengan judul *Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Dalam bukunya mampu memberikan penggambaran paling baik tentang bagaimana operasi logika kekeluargaan dalam menghinggapi berbagai praktik sosial keseharian. Ia mengatakan bahwa keluarga di Indonesia selain institusi, adalah cara pandang atas dunia. Kita melihat berbagai bidang kehidupan dengan perspektif keluarga, tidak terkecuali politik dan sejarah. Pada praktik politik di pemerintahan, model politik yang mengoperasikan paradigma keluarga, disebut sebagai politik patron-klien atau

dalam istilah yang khas Indonesia dinamakan politik kekeluargaan. Konsepsi politik kekeluargaan, struktur formal organisasi, seperti negara dan birokrasi modern lainnya (aturan formal organisasi), kerap kali ditolak dan direduksi menjadi relasi personal (tak ubahnya keluarga) (LKPI,2014).

Penelitian Wasisto Raharjo Jati dalam ranah lokal, romantisme nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat eksis terus menerus. Familisme sendiri dibentuk dalam tiga level, yakni figure (*personalism*), klientelisme (*clientism*), dan tribalisme (*tribalism*) sebagai ketiga kunci dalam mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan demokrasi lokal di Indonesia. Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang di lakukan dalam dua jenis yakni secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat relasionalnya sehingga kerabat yang ingin memasuki kancah pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Adapun *by accident* sendiri terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan “informal” terhadap penggantinya kelak jika dalam pemilukada (Jati,2013).

Ideologi familisme ini juga dapat di gerakkan dengan system segmentar yang mana ciri utama dari politik segmentar ini adalah kelompok lokal yang bersatu atas dasar keturunan unilinear—mengikuti satu garis arah keturunan—atau kepercayaan kepada adanya keturunan yang demikian terdapat oposisi segmentar yang menjadi ciri hubungan antar kelompok (Anggraini, 2013). Pada politik segmentar ini kekuasaan tidak terpusat tetapi di distribusikan kepada

kelompok-kelompok, sehingga hubungan sosial yang terjadi juga berisikan hubungan politik. Hubungan politik inilah yang dimaknai sebagai politik kekerabatan. Distribusi kekuasaan pada kelompok memungkinkan lahirnya oposisi segmentar yang memberi ciri dalam hubungan politik segmentar. Dalam keadaan tertentu kelompok itu saling bekerja sama namun pada keadaan tertentu kelompok itu saling bermusuhan.

Gejala penting dalam struktur politik segmentar juga dipandang sebagai hubungan kekerabatan. Keseimbangan kekuasaan yang terbentuk antara kelompok tersebut akibat adanya saingan antara mereka. Pada waktu dan keadaan tertentu kelompok-kelompok bekerja sama dan pada keadaan yang lain kelompok itu mereka berkombinasi menghadapi kelompok lain sebagai lawan bermain. Dalam politik segmentar setiap kelompok berdiri sendiri namun pada keadaan lain menjadi bagian kelompok yang lebih besar. Pada perkembangan politik modern, politik segmentar berlaku pula dalam masyarakat yang kompleks berupa perwakilan politik (partai) yang dikenal dengan istilah koalisi dan oposisi. Partai-partai berkoalisi karena memiliki kepentingan yang sama dalam merebut dan mempertahankan posisi politik, diwaktu yang lain beroposisi secara sendiri maupun dengan partai yang lain menghadapi partai yang lebih dominan. Koalisi dan oposisi politik diperlukan dalam suatu sistem politik demi menjaga kekuasaan yang cenderung otoriter. Oposisi menjadi lembaga pengontrol kekuasaan yang efektif dalam sistem politik modern, sehingga dikembangkan istilah yang populer tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi (Anggraini,2013).

1.5.2. Partai Politik dan Politik Familisme

Partai politik memiliki posisi sentral dalam proses pengisian jabatan di negeri ini. Bagaimana tidak, pengisi jabatan di legislatif, eksekutif dan bahkan yudikatif pun partai memiliki andil yang besar. Anggota DPR, DPRD, pasangan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa diisi oleh calon dari partai peserta pemilu. Begitu juga di daerah, partai menjadi jalan tol untuk menjadi calon kepala daerah. Kalaupun tersedia ruang bagi calon perseorangan untuk menjadi calon kepala daerah, pilihan melalui jalur ini bak melintas di tepi jurang nan terjal.

Jabatan-jabatan diluar ranah eksekutif dan legislatif juga masih memerlukan peran dari orang partai. Contohnya untuk menjadi calon hakim agung, hasil seleksi di komisi Yudisial harus di seleksi lebih lanjut di DPR. Begitupula dengan pengisian komisi-komisi negara independen, semuanya harus melalui proses *fit and proper test* di DPR oleh mereka yang berasal dari partai. Secara sederhana, partai benar-benar superior dalam sistem politik Indonesia. Dengan begitu partai menjadi kekuatan yang sulit di kontrol. Karenanya tidak menuntut kemungkinan dapat mengungkapkan postulat Lord Acton, "*power tends to curroupt, absolute power curroupt absolutely*" (Isra, 2017 :102). Dan apa yang terjadi di kalangan politisi saat ini yang tersejar kasus korupsi dapat sebagai bukti empirik dari validitas postulat Lord Acton tersebut. Namun, perlu di ketahui tidak semua partai seperti itu.

Penyusunan Amandemen UUD 1945 juga banyak di ketahui bias terhadap partai. Karena penyusun perubahan undang-undang tersebut merupakan politisi yang merepresentasikan kepentingan partai. Terlebih lagi, perubahan di lakukan

saat terjadi krisis kepercayaan kepada eksekutif dan legislative. Maka DPR berusaha memperkuat posisi DPR yang kita tahu berasal dari kalangan mereka sendiri.⁸ Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa di dalam tubuh partai terapat kekuatan yang tidak mampu di kontrol oleh rakyat tetapi juga terdapat kekuatan yang dikuasai oleh beberapa orang.

Kekuasaan yang superior di dalam partai tentunya akan menarik bagi elit politik partai untuk mempertahankan posisinya di dalam partai tersebut dengan mengajukan anggota keluarganya atau kerabatnya sebagai penerus dari pimpinan partai. Terlebih lagi posisi sebagai ketua umum partai merupakan kedudukan prestise, karena ketua umumlah yang mengakomodir bagaimana jalannya partai tersebut. Dengan kata lain ketua umum partai mampu mengendalikan kadernya yang sedang menjabat sebagai anggota DPR, Presiden, Kepala Daerah dll. Ketua umum partai juga dapat menjadi patron dalam partai tersebut dan anggota DPR, kepala daerah maupun pejabat lainnya merupakan *client* dari ketua partai tersebut. Bukti empiris adanya familisme dalam partai tersebut dengan adanya patron-klien yang menjadi relasi familisme didalam partai tersebut.

Jika di dalam partai terdapat beberapa keluarga yang berkuasa, maka partai tersebut akan sulit di kontrol, karena mereka bersatu menjadi afiliasi dalam internal partai. Terlebih jika itu karena faktor genealogisakan lebih sulit bagi kader atau anggota biasa yang bergabung dalam internal partai untuk bisa berkembang. Kekuatan genealogis dalam internal partai bukan hanya berpengaruh pada kondisi di dalam internal partai tersebut. tetapi juga ketika ada pemilihan umum. Seseorang dengan kekuatan kekerabatan keluarga biasanya akan lebih mudah mendapatkan suara terbanyak karena lebih dikenal oleh

masyarakat luas. Selain itu, identitas dari keluarga tersebut memudahkan calon untuk dikenali bagaimana latar belakangnya oleh masyarakat.

1.5.3. Politik Familisme dalam Konteks Demokrasi

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan empirik (Afan,2006) Dalam pemahaman secara normatif demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti yang biasa kita kenal “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” yang di ungkapkan oleh Abraham Lincoln. Di Indonesia ungkapan secara normatif tersebut disebutkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UUD 1945 merupakan definisi normatif dari demokrasi. Tetapi apa yang normatif juga belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari di suatu negara. Oleh karena itu, kita perlu melihat makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya di kehidupan politik praktis. Salah satu wujud dari bentuk demokrasi di Indonesia yaitu dengan berlakunya asas desentralisasi di era reformasi, yang mana pemerintah memberikan hak otonom kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya. Hal ini disebabkan oleh era Orde Baru yang cenderung sentralistik dan kekuasaan negara di kuasai oleh klan Soeharto.

Demokrasi secara empirik dalam perkembangannya sangat sulit untuk di wujudkan. Adanya kekuasaan di setiap daerah menciptakan raja-raja kecil di wilayahnya atau yang bisa kita sebut *local strongmen*. Jika kita melihat sejarah, *local strongmen* ini muncul akibat dari runtuhnya rezim Soeharto, yang mana mereka dulunya kerabat Soeharto yang mampu mendapatkan kekuasaan di negara.

Akan tetapi, setelah berlakunya otonomi daerah mereka mengguide kepala daerah atau pemimpin di setiap daerah sehingga mereka tetap bisa mempertahankan kekuasaannya meskipun terpecah-pecah di setiap daerah. Hal ini pula yang terus-menerus terjadi, karena mereka belajar dari sistem pemerintahan Soeharto yang selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan melibatkan seluruh kerabatnya dalam kekuasaan yang kemudian kita kenal dengan politik kekerabatan atau politik familisme. Paradigma ini ternyata juga mempengaruhi seluruh sistem pemerintahan di Indonesia, baik dalam legislatif, eksekutif, yudikatif bahkan partai politik sekalipun.

Zuhro (2013) menyatakan, fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi yang tidak sehat. Politik kekerabatan yang berkembang di suatu daerah, juga berdampak pada banyaknya tahapan pilkada yang cacat. Namun, rakyat sebagai pemilih juga patut dikritisi. Sebab, secara substansial demokrasi yang sehat itu bisa dicapai apabila pemilihnya juga berkualitas (Hidayati,2014 : 18-19). Dalam tingkat politik lokal di Indonesia masih ditawan oleh pengaruh dari *local strongmen* dan *roving bandits* sehingga meskipun sudah terjadi transformasi politik, namun demokrasi tetap terpenjara oleh kepentingan elit politik lokal (Agustino:2010 dalam Alim:2011).

Demokrasi yang terpenjara ini sebenarnya muncul juga dari reformasi yang di buat oleh pemerintah Indonesia melalui sistem desentralisasi. Hal ini di buktikan melalui kajian Henk Schulte dan Gerry van Klinken (dalam Chalik,2017) yang mana mereka pesimis terhadap perubahan menjadi sistem desentralisasi yang tercermin dalam demokratisasi di berbagai daerah. Desentralisasi yang tujuannya untuk mengembangkan daerah menjadi lebih mandiri justru lebih didominasi oleh

pertarungan elite politik maupun elite birokrasi. Akibatnya desentralisasi ini menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal. Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elite politik justru menjadi persoalan baru. Pasalnya dengan sistem desentralisasi, pergerakan politik masyarakat mulai beragam di tiap-tiap daerah. Hak otonom yang dimiliki oleh daerah menciptakan beragam partisipasi bahkan kontestasi oleh elit politik lokal dalam memperoleh, menjalankan serta mempertahankan legitimasi mereka dalam masyarakat.

Perubahan sistem politik dari sentralistis menjadi desentralisasi mengakibatkan munculnya politik oligarki dan otoritarianisme baru. Kondisi tersebut tercipta akibat dari munculnya *local strongmen* –yang selama orde baru aspirasinya di kebiri-. *Local strongmen* (elite lokal) inilah yang melahirkan dinasti politik baru, pola korupsi baru (Warren,2004) dan penyalahgunaan wewenang. Peran dari elite politik lokal yang seperti inilah yang mengebiri demokrasi di ranah daerah. Warren (2004) mengemukakan konsepsi baru mengenai peristiwa tersebut yang di kenal dengan “korupsi demokrasi”. Korupsi demokrasi (*corruption of democracy*) yang dimaksud oleh Warren (Irham, 2012) yaitu tindakan-tindakan yang disembunyikan dari publik dengan maksud mengeksklusi orang-orang yang sebenarnya berhak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tindakan korupsif tersebut. Dalam hal ini, orang-orang yang korup sebenarnya menyadari hal itu dan mengetahui hal itu, mereka melanggar norma-norma kolektif sehingga mereka menutup-nutupi tindakannya.

Demokratisasi seolah memunculkan kondisi “kemuka-duaan”³ Disatu sisi demokratisasi dan desentralisasi memberikan harapan untuk membangun kehidupan berpolitik dan bernegara yang lebih baik dari masa otoritarianisme Orde Baru. Namun disisi lain, demokratisasi dan desentralisasi ini diiringi dengan tindakan koruptif di tingkat lokal. Bahkan demokrasi modern menciptakan munculnya “raja-raja” baru yang bersifat patrimonialistik dan feodalistik.

Aqil Irham (2012) menulis mengenai korupsi demokrasi dalam partai politik ditandai dengan sentralisme partai politik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sentralisme yang dimaksud berupa peran sentral elite partai politik yang mengeksklusi pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan terkait rekrutmen dan seleksi kandidat calon kepala daerah. Dalam penulisan ini menjelaskan bagaimana proses eksklusi tersebut berlangsung sedemikian rupa sehingga mengindikasikan tindakan-tindakan koruptif di ranah partai politik selama proses berlangsungnya prosedur demokrasi.

1.5.4. Politik Familisme dan Budaya Politik Masyarakat Tradisional NU

Almond dan Verba (dalam Gaffar, 2006:99) mendefinisikan budaya politik sebagai “sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) mengklasifikasikan tipe-tipe kebudayaan politik : (1) Budaya politik parokial (*parochial political culture*) yang

³ teori demokrasi Warren (2004;2006;2012) dalam tulisan Irham, kondisi demokrasi “muka dua” dapat dipahami sebagai kondisi dimana nilai-nilai dan norma-norma demokrasi dijunjung tinggi di hadapan publik, tetapi sekaligus dilanggar dan di gerogoti.

ditandai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang sangat rendah. Hal ini disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; (2) Budaya politik subyek (*subject political culture*) di mana anggota-anggota masyarakatnya memiliki minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem secara keseluruhan, terutama terhadap *output*-nya, namun perhatian atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol; dan (3) Budaya politik partisipan (*participant political culture*) yang ditandai oleh adanya perilaku bahwa seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik sehingga menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) dan dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya (Mulyawan,2015).

Budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Budaya politik yang demokratis, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif akan mendukung sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Budaya politik yang demokratis ini menyangkut “*suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menompang terwujudnya partisipasi*” menurut Almond dan Verba (dalam Gaffar, 2006:101). Keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan kunci terhadap sikap politik dan keyakinan terhadap kemampuan tersebut merupakan kunci terpeliharanya demokrasi. Artinya ketika warga negara memiliki keyakinan pada mereka yang memiliki kemampuan untuk terlibat proses politik yang berjalan. Sehingga konsekuensinya adalah pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Jika tidak maka masyarakat akan mengalami *deprivasi*. Jika pemerintah meninggalkan masyarakatnya maka mereka tidak akan memilih

pemimpin yang meninggalkan mereka. Sebaliknya jika masyarakat merasa tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses politik maka peran dari pemerintah akan sangat dominan. Masyarakat akan di jadikan objek kebijakan pemerintah yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Disinilah salah satu sumber utama terbentuknya budaya politik demokratik, yaitu *civic culture*.

Almond dan verba mengkaitkan antara tinggi rendahnya budaya politik atau *civic culture* dengan kehadiran demokrasi dalam sebuah negara. Dari hasil penelitian survey yang di lakukan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko, kedua ilmuwan tersebut mengungkapkan bahwa negara yang memiliki *civic culture* yang tinggi akan menompang demokrasi yang stabil. Sebaliknya jika derajat *civic culture* negara tersebut rendah maka tidak akan mampu mendukung sebuah demokrasi negara yang stabil. Karenanya diperlukan peran partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap sistem politik di Indonesia untuk mencapai demokrasi yang stabil.

Budaya politik Almond dan Verba dengan budaya politik masyarakat nahdliyin akan dikaitkan satu sama lain dalam penelitian ini. Masyarakat Nahdliyin merupakan jama'ah dari organisasi islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi gudangnya kiai dan ulama di Indonesia. Hal ini di karenakan kiai dan ulama yang memiliki pendidikan tinggi mayoritas berasal dari NU, yang mana mereka belajar secara langsung dengan ulama-ulama yang berada di Makkah dan Madinah. Dan mereka kemudian pulang ke Indonesia membangun pesantren dan memiliki banyak santri di dalam pondok pesantrennya. Para kiai dan ulama ini mengajarkan ilmu-ilmu agama (*'ulum al-diniyah*) yang mampu

menjadi sebuah keyakinan, norma dan budaya bagi para santrinya hingga disebarkan pula ke seluruh masyarakat disekelilingnya. Karena dalam relasi sosio-kultural di Indonesia, kiai memiliki kedudukan dan posisi penting dalam membina dan menata kehidupan sosial di masyarakat sesuai dengan kapasitasnya sebagai pewaris nabi (*warasat al-anbiya*). Makna pewaris nabi tersebut merupakan legitimasi bagi kiai untuk menjalankan berbagai tugas diantaranya mendidik umat dalam bidang agama dan lainnya, melakukan *control* sosial dan masyarakat, memecahkan problem sosial di dalam masyarakat, dan menjadi makelar budaya (*cultural brokers*) yakni menjadi agen sosial perubahan di masyarakat. Sehingga masyarakat Islam di lingkungan tersebut memiliki nilai-nilai dan kebudayaan yang selalu dilakukan di setiap mommentnya yang mampu merubah budaya-budaya yang kurang baik di dalam masyarakat tersebut. Nilai yang selalu mereka pegang adalah islam nasionalisme dengan berpedoman pada *ahlu Sunnah wal jama'ah*⁴.

Nahdliyin merupakan masyarakat golongan Nahdlatul Ulama yang mana organisasi tersebut menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Sehingga dalam pelaksanaan beribadahnya kaum nahdliyin lebih fleksibel selama masih sejalan dengan ajaran ulama *ahlusunnah*. Kecintaan kepada budaya lokal dan menjunjung nasionalisme membuat organisasi ini sangat diterima oleh masyarakat. Karena ulama dan kiai NU mampu mengubah budaya masyarakat abangan menjadi masyarakat santri yang di penuh dengan kegiatan-kegiatan paguyuban keagamaan. Salah satu contohnya yaitu istighosah, yasin tahlil, suronan dll. Yang mana kegiatan tersebut bukan hanya mengajarkan agama islam tetapi juga di

⁴ komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan Thoriqoh para sahabatnya dalam hal aqidah, amaliyah fisik (fiqih) dan hakikat (Tasawwuf dan Ahlaq) .

akulturasikan dengan budaya lokal yang terkadang masih terdapat budaya *kejawen*⁵ didalamnya. Ini pula yang menjadi ciri khas dari nahdliyin dan NU sendiri yaitu identitas pluralisme yang mereka pegang teguh baik dalam kehidupan sosial, politik dan budaya.

Dimensi yang dimiliki NU yakni sosio-kultural dan politik menjadi entitas bagi NU sebagai organisasi kemasyarakatan. NU sendiri sesungguhnya merupakan wadah perjuangan politis para ulama tradisional untuk tetap meneguhkan eksistensi sikap politis mereka dalam beragama di tengah maraknya gerakan peKiaiaruan keagamaan. NU sendiri bisa dikatakan sebagai praktik berjaring para ulama dan pesantren dalam mengedepankan tradisi maupun kebebasan dalam berpikir keagamaan yang tidak sepenuhnya konservatisme. Praktik politik yang dijalankan NU sendiri menggunakan politik komunalisme yang dilakukan oleh santri maupun kalangan nahdliyin lainnya dimana sikap rasionalisme tidak terlalu ditonjolkan. Hal ini dikarenakan NU sendiri bertumpu pada komodifikasi kultur tradisi patronase ulama dan santri sehingga menjadikan NU sebagai “pesantren besar” dan pesantren adalah “NU kecil”. Adanya dikotomi yang kausalistik itulah menjadikan NU dapat hadir dalam relasi kultur dan politik.

Islam tradisional yang berbasis dengan budaya menjadi kriteria, identitas politik dan loyalitas bagi terpenting bagi warga NU yang merupakan anggota politis organisasi keagamaan tertentu. Masuknya ulama ke arena politik praktis dalam wadah NU sendiri diartikan sebagai perjuangan politis eksistensi kebebasan

⁵ Kepercayaan yang dianut masyarakat di pulau Jawa oleh suku Jawa atau lainnya yang menetap di Jawa. Kepercayaan ini berlandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf Jawa. Dikenal dengan ajaran atau aliran “sesat” oleh beberapa masyarakat.

bermazhab dalam agama islam, namun juga bisa dilihat peran NU dalam arena politik di Indonesia yang mana bisa dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, ulama di harapkan sebagai aktor yang mampu membersihkan praktik politik yang kotor melalui sikap integritas agamawi yang disandangnya. Kedua, adanya semangat *amar ma'ruf nahi munkar* yang diemban para ulama untuk membebaskan arena politik dari kepentingan-kepentingan politik kotor. Ketiga, ulama berperan sebagai filter sosial dan *conflict breaker* dalam manajemen konflik dimana politik yang cenderung mengedepankan adanya komunitas sendiri cenderung mudah terkooptasi oleh berbagai isu sara. Keempat, ulama diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan umat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam serangan politis (Jati, 2013).

Peran ulama dalam politis masuk ke dalam PPP yang lahir dari rahim NU. Keberadaan pesantren di ranah lokal merupakan aset politik kultural terpenting dimana pesantren juga menjadi basis suara bagi NU. Oleh karena itu karakteristik budaya lokal pesantren juga mempengaruhi dari sikap dan perilaku kader PPP dalam berpolitik. Misalnya dalam pembacaan pidato selalu diawali dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an. Dan mukadimah pidato pimpinan partai biasanya diawali dengan Bahasa Arab sebagaimana lazimnya dalam forum pengajian pesantren untuk meningkatkan citra elektabilitas, legitimasi sekaligus dukungan politik dari para ulama terhadap kapasitas, posisi dan peran dari elite PPP tersebut.

Poros pesantren yang terpolitisasi membuat ulama menjadi kian terlegitimasi di mata umat dimana pesan kultural dan kebangsaan yang coba dibangun oleh ulama mulai terkooptasi dengan kepentingan politik praktis. Ulama kian terseret dalam praktis politik sehingga mampu memudarkan perannya

sebagai penerjemah sosial kemasyarakatan. Konflik yang terjadi antar ulama tersebut tidak dilakukan oleh beberapa aktor saja melainkan berjejaring antarpesantren. Hal ini dikarenakan hubungan yang terjadi antara kiai dengan santri dibangun dengan pola patron-klien dan bersifat irasional. Kesetiaan yang dibangun berdasarkan ikatan emosional, psikologis, dan imbas hutang budi. Pola yang dibangun tersebut menunjukkan adanya praktik familisme melalui relasi patron-klien. Kesetiaan yang dimiliki oleh santri terhadap kainya atau sebaliknya menciptakan rasa saling memiliki antara keduanya sama seperti keluarga. Oleh karenanya, dalam kepentingan politik praktis, jika keturunan dari kiai atau ulama tidak ada yang mampu megemban amanah, maka biasanya kiai atau ulama akan menyerahkannya kepada santri kepercayaan. Meskipun dalam hal ini kiai atau ulama tidak terjun secara langsung ke lapangan, tetapi amanah yang diberikan kepada keluarganya atau santrinya akan dilaksanakan sesuai titah yang diberikan. Dalam hal ini tentu saja menunjukkan kiai sebagai patron dan santri atau sanak *family* sebagai kliennya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Kualitatif

Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik kelompok teori kritis serta post modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Cresswell, 1994). “Gaya” penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Sesuai dengan tema yang di angkat peneliti yaitu menenai praktik familisme dalam partai PPP ini, peneliti akan sangat

memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas praktik familisme di PPP Kabupaten Rembang. Sehingga penelitian ini mencoba akan membuktikan apakah praktik familisme benar terjadi sesuai dengan teori patron-klien yang telah di kemukakan oleh para ahli, atau justru peneliti menemukan penemuan baru mengenai praktik familisme dalam penelitiannya. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkuat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif ini nantinya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya (Soemantri, 2005).

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin menganalisa mengenai bagaimana politik familisme itu terjadi di dalam partai PPP. Sehingga penelitian yang di lakukan di lapangan nantinya akan bersifat natural setting, karena obyek penelitian yang alamiah. Dengan begitu kebenaran dari hipotesa peneliti akan di terjawab melalui metode ini. Metode kualitatif ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono,2014). Penelitian ini akan menjawab dengan berbagai analisa secara mendalam berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam partai PPP di Kabupaten Rembang secara nyata. Melalui fakta-fakta yang di temukan di lapangan, akan dikonstruksikan menjadi hipotesa atau teori. Oleh karena itu penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan model kuantitatif karena penelitian ini membutuhkan penjelasan mendalam melalui observasi langsung atau wawancara mendalam dengan berbagai tokoh, bukan dengan berbagai data sampling yang kemudian di generalisasikan. Itulah mengapa penelitian ini perlu menggunakan metode kualitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui observasi peneliti kepada objek penelitian yaitu di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang, seperti peneliti terlibat langsung didalamnya atau bahkan berbincang-bincang dengan narasumber untuk memperoleh data primer. Peneliti juga perlu dokumentasi untuk memperoleh analisa yang tepat. Praktik familisme di Partai PPP ini harus melihat bagaimana proses dari praktik itu terjadi atau fenomena –fenomena yang terjadi didalam partai. Sehingga sangat penting untuk pemilihan metode yang tepat guna menjawab rumusan masalah peneliti.

1.6.2. Strategi Penelitian : Studi Kasus

Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Peneliti akan mengkaji kasus politik familisme di partai PPP Kabupaten Rembang. Penelitian ini mengambil studi kasus partai PPP karena PPP merupakan partai berbasis Islam yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kaum nahdliyin, yang mana seorang Kiai memiliki pengaruh sangat besar di dalam partai tersebut. Sedangkan mengapa peneliti mengambil Kabupaten Rembang, karena kabupaten

Rembang merupakan salah satu wilayah dengan basis massa PPP terbesar di Jawa Tengah. Bahkan tokoh kiai yang menjadi subjek penelitian juga berasal dari Rembang, dan mereka langsung berkecimpung di partai PPP. Sehingga hubungan kekerabatan yang terjalin sangat kuat dengan para petinggi partai PPP.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono,2014).

Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan menggunakan dua teknik yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam kepada informan. Narasumber dari penelitian ini nantinya yaitu tokoh partai PPP (Ketua Umum DPC Kabupaten Rembang), Kiai dari Partai PPP, pengamat politik PPP, dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan data-data penjelas dan penguat dari wawancara mendalam dan FGD. Dokumentasi ini dapat berupa catatan, hasil kebijakan partai, biografi, sejarah kehidupan, dll. Bukan hanya itu,

dokumentasi ini juga bisa berupa catatan peristiwa, kejadian penting atau aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan penelitian.

1.6.4. Metode Analisis

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen,1982 dalam Moleong, 2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan menemuakn pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir. Proses ini tidak seperti penelitian kuantitatif dimana peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi dan akhirnya menuliskan laporan.

Menurut Miles dan Heberman (1984) dalam Sugiyono (2007) ada tiga alur dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara bersamaan yang mana nantinya akan di gunakan pula oleh peneliti dalam menganalisis data yakni :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah melakukan wawancara

dengan narasumber dari partai PPP, Kiai atau pengamat politik, peneliti akan langsung melakukan reduksi data guna untuk merangkum dan memfokuskan hasil wawancara pada hal-hal yang berkaitan dengan praktik politik familisme.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian, hubungan antar kategori atau teks yang bersifat naratif. Peneliti akan menyajikan uraian tentang praktik familisme dalam partai PPP dengan alur cerita melalui data yang telah di peroleh sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan sejak awal penelitian dan terus dilakukan secara konsisten setiap setelah melakukan penelitian agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian praktik politik familisme, nantinya akan menjadi sebuah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini nantinya akan berupa deskripsi atau gambaran mengenai praktik politik familisme didalam partai PPP yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap. Sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis ataupun teori tentang familisme dalam partai politik.